



## Analisis penerapan sistem proteksi kebakaran sebagai upaya pencegahan kebakaran di Instansi serta lingkungan masyarakat Kabupaten dan Kota Cirebon

Fitri Kurnia Rahim, Icca Stella Amalia, Ifani Eka, Besta Al Zahra, Rahayu Nita

Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan

### How to cite (APA)

Nita, R., Naufal, M. A., Saepudin, I. L., Eka, I., Zahra, B. A. (2024). Analisis Penerapan Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Di Instansi Serta Lingkungan Masyarakat Kabupaten Dan Kota Cirebon Tahun 2023. *Journal of Health Research Science*, 4(1), 10-18. <https://doi.org/10.34305/jhrs.v4i1.1095>

### History

Received: 5 April 2024

Accepted: 8 Mei 2024

Published: 8 Juni 2024

### Corresponding Author

Rahayu Nita, Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan; [rahayunita856@gmail.com](mailto:rahayunita856@gmail.com)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Bencana kebakaran ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan perilaku masyarakat mengenai pencegahan kebakaran, serta di beberapa instansi belum menerapkan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan peraturan pemerintah.

**Metode:** Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif menggunakan metode observasional dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian ini 118 orang serta 4 instansi yakni 2 fasyankes dan 2 instansi pemerintahan.

**Hasil:** Analisis univariat di peroleh hasil beberapa intansi tidak ada yang sesuai dengan dasar hukum Permen PU No.26 Tahun 2008 mengenai alat deteksi kebakaran, springkler, hydrant, dan alarm kebakaran, intansi yang sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai APAR terdapat presentase 93%, pengetahuan dan perilaku masyarakat rata-rata telah mengetahui penanganan mengenai tanggap darurat kebakaran.

**Kesimpulan:** Beberapa intansi tidak ada yang sesuai dengan dasar hukum Permen PU No.26 Tahun 2008 mengenai alat deteksi kebakaran, springkler, hydrant, dan alarm kebakaran. Pengetahuan dan perilaku masyarakat rata-rata telah mengetahui penanganan mengenai tanggap darurat kebakaran.

**Kata Kunci:** Pengetahuan, perilaku, sistem proteksi kebakaran

### ABSTRACT

**Background:** Fire disasters are caused by a lack of public knowledge and behavior regarding fire prevention, and in some agencies have not implemented a fire protection system in accordance with government regulations. Objective: to determine the description of the implementation of fire protection systems in several agencies and the knowledge and behavior of the community regarding fire in Cirebon Regency and City in 2023.

**Method:** This type of research is quantitative research using observational methods with a Cross Sectional approach. The population of this study was 118 people and 4 agencies, namely 2 health facilities and 2 government agencies.

**Result:** Univariate analysis obtained the results of several agencies none of which are in accordance with the legal basis of Permen PU No.26 of 2008 regarding fire detection devices, springklers, hydrants, and fire alarms, agencies that are in accordance with government regulations regarding fire extinguishers have a percentage of 93%, knowledge and behavior of the average community has known the handling of fire emergency response.

**Conclusion:** Some agencies are not in accordance with the legal basis of Permen PU No.26 of 2008 regarding fire detection equipment, springkler, hydrant, and fire alarm. Knowledge and behavior of the community on average have known the handling of fire emergency response.

**Keyword :** Knowledge, behavior, fire protection system

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam diantaranya kebakaran, kerusakan ekologi, polusi, dan lain-lain. Bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang memerlukan perhatian khusus karena dampaknya sangat besar. Bencana-bencana ini secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua kategori: "bencana alam" dan "bencana perumahan". Kebakaran yang disebabkan oleh fenomena alam termasuk dalam kategori bencana alam, seperti kebakaran hutan yang disebabkan oleh kekeringan atau longsor lahar vulkanik. Kategori kebakaran yang termasuk dalam bencana pemukiman antara lain kebakaran pemukiman, gedung, peralatan, transportasi, dan lain-lain (Asiri, 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 kebakaran adalah suatu keadaan dimana suatu bangunan seperti rumah, pabrik, pasar, atau lainnya terbakar sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian. Kebakaran merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh faktor yang tidak alami yakni peristiwa timbulnya api yang tidak diinginkan atau tidak pada tempatnya, dan peristiwa ini dibentuk oleh tiga unsur utama diantaranya adalah unsur bahan bakar, unsur oksigen, dan sumber panas (Rahardjo et al., 2019).

Berdasarkan data statistik Jawa Barat tercatat 601 bencana yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2021. Rata-rata kebakaran di Provinsi Jawa Barat sebanyak 200 bencana yang terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Kota Bandung menjadi kota dengan tingkat kebakaran tertinggi yaitu sebanyak 87 kasus. Di Kota Cirebon dari periode tahun 2019 hingga 2021 tercatat sebanyak 7 kasus kebakaran (Murtaqi & Rahadian, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan prosedur yang tepat dan efektif. Dalam menghadapi keadaan

darurat diperlukan beberapa acuan yakni, pengetahuan serta sikap menghadapi bencana, prosedur keadaan darurat bencana kebakaran, organisasi pemadam kebakaran, sarana/prasarana pencegahan kebakaran (B. A. Putri, 2018).

Rencana tindakan darurat kebakaran merupakan rencana atau jadwal yang berisi tata cara untuk menetapkan seseorang harus melakukan apa jika terjadi suatu kebakaran, serta setiap gedung harus mempunyai rencana keselamatan kebakaran yang berbeda tergantung situasi (Gogendra & Andriyani, 2020). Untuk mengelola tingginya risiko kebakaran ini, upaya preventif harus dilakukan, salah satunya yakni dengan mengenali penyebab kebakaran serta mengambil tindakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran (Pramayu et al., 2023).

Menurut Heri Zulfikar dan Gunawan tahun 2018 menjelaskan bahwa kebakaran dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, serta kurangnya pemahaman tentang penanganan kebakaran dan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung khususnya bangunan umum (Paat et al., 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan teknis untuk sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan dan lingkungan sekitar menjadi hal yang paling utama. Oleh karena itu setiap bangunan harus memiliki sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif (N. A. Putri et al., 2019).

Sistem proteksi kebakaran adalah kesatuan sistem yang harus ada dalam perencanaan bangunan. Sistem ini salah satu elemen penting pada sebuah bangunan untuk menghadapi kebakaran (Sholeh et al., 2021). Sistem proteksi kebakaran juga merupakan suatu sistem proteksi terhadap kebakaran yang dirancang untuk mengatur penggunaan bahan atau material bangunan,

melindungi bangunan dari bukaan serta memisahkan bangunan sesuai dengan tingkat ketahanan apinya (Taufiq & Abdi Bangsa, 2023).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Penerapan Sistem Proteksi Kebakaran di beberapa Instansi dan Pengetahuan serta Perilaku Masyarakat mengenai Kebakaran di Kabupaten dan Kota Cirebon Tahun 2023”.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode observasional dengan pendekatan *Cross Sectional*. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kabupaten dan Kota Cirebon dengan jumlah total sampel yaitu 118 orang serta 4 instansi yakni 2 fasyankes dan 2 instansi pemerintahan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan serta perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran dan lembar checklist untuk mengetahui sistem proteksi kebaran baik aktif maupun pasif pada 4 instansi. Analisis data menggunakan analisis univariat.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Sistem Proteksi Kebakaran

#### 1. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif

Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi

kebakaran lengkap yang terdiri dari sistem alarm kebakaran manual atau otomatis, sistem pemadam air, dan sistem pemadam kimia. Yang termasuk sistem proteksi kebakaran aktif yaitu APAR, sprinkler, alarm kebakaran, detektor kebakaran, dan hydrant (Yudila et al., 2022). Sistem proteksi ini dapat memberikan kontribusi besar dalam manajemen kebakaran (D. R. Putri & Kosyeanto, 2020).

#### 2. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif

Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang dibangun dengan mengatur penggunaan bahan dan komponen bangunan, memisahkan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan api, dan melindungi bukaan (Fatana, 2018). Sistem proteksi pasif biasanya berupa bangunan permanen yang telah sesuai standar konstruksi yang tahan api (Sari & Sukwika, 2020).

#### 3. Fire Safety Management

*Fire Safety Management* merupakan sutau pola pengelolaan dan pengendalian unsur manusia, sistem peralatan, data teknis dan perlengkapan lain dengan tujuan untuk meningkatkan dan menjamin keselamatan (Djafar et al., 2021).

### B. Gambaran Kesesuaian Sistem Proteksi Kebakaran Aktif di Instansi Kabupaten dan Kota Cirebon Tahun 2023

**Tabel 1. Gambaran hasil kesesuaian intansi dalam penerapan prosedur alat deteksi kebakaran dengan Permen Pu No.26 Tahun 2008**

Instansi	Hasil	Kategori	Keterangan
Instansi A	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi B	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi C	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi D	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali

Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa kesesuaian instansi dalam penerapan

prosedur alat detektor kebakaran yakni 0% dengan kategori kurang yang berarti tidak

sesuai sama sekali dengan Permen PU No 26 tahun 2008, hal ini dikarenakan pada instansi tersebut belum memasang detektor

kebakaran akibat anggaran yang terlalu besar.

**Tabel 2. Gambaran hasil kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur sprinkler dengan Permen PU No.26 Tahun 2008**

Instansi	Hasil	Kategori	Keterangan
Instansi A	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi B	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi C	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi D	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur sprinkler yakni 0% dengan kategori kurang yang berarti tidak sesuai sama sekali

dengan Permen PU No 26 tahun 2008, hal ini dikarenakan pada instansi tersebut belum memasang sprinkler.

**Tabel 3. Gambaran hasil kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur APAR dengan Permen PU No.26 Tahun 2008**

Instansi	Hasil	Kategori	Keterangan
Instansi A	93%	Baik	Sesuai Persyaratan
Instansi B	57%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi C	64%	Cukup	Terpasang tetapi ada sebagian yang tidak sesuai
Instansi D	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa kesesuaian instansi A dalam penerapan prosedur sprinkler yakni 93% dengan kategori baik yang berarti sesuai persyaratan dengan Permen PU No 26 tahun 2008, hal ini dikarenakan pada instansi tersebut sudah tersedia APAR. Sedangkan untuk instansi B dan D masing-masing

mendapatkan hasil 57% dan 0% dengan kategori tidak sesuai sama sekali dengan Permen PU No 26 tahun 2008 hal ini dikarenakan pada instansi tersebut tidak tersedianya APAR. Dan untuk instansi C yakni 64% dengan kategori cukup yang berarti terpasang tetapi ada sebagian yang tidak sesuai.

**Tabel 4. Gambaran hasil kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur hydrant dengan Permen PU No.26 Tahun 2008**

Instansi	Hasil	Kategori	Keterangan
Instansi A	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi B	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi C	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi D	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur penyediaan hydrant yakni 0% dengan kategori kurang yang berarti tidak

sesuai sama sekali dengan Permen PU No 26 tahun 2008, hal ini dikarenakan pada instansi tersebut belum terpasang hydrant.

**Tabel 5. Gambaran hasil kesesuaian intansi dalam penerapan prosedur alarm kebakaran dengan Permen PU No.26 Tahun 2008**

Instansi	Hasil	Kategori	Keterangan
Instansi A	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi B	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi C	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi D	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur penyediaan alarm kebakaran yakni 0% dengan kategori kurang yang berarti tidak sesuai sama sekali dengan Permen PU

No 26 tahun 2008, hal ini dikarenakan pada instansi tersebut belum terpasang alarm kebakaran dan masih menggunakan alarm manual.

### C. Gambaran Kesesuaian Sistem Proteksi Kebakaran Pasif di Instansi Kabupaten dan Kota Cirebon Tahun 2023

**Tabel 6. Gambaran hasil kesesuaian intansi dalam penerapan prosedur jalur evakuasi dengan Permen PU No.26 Tahun 2008**

Instansi	Hasil	Kategori	Keterangan
Instansi A	100%	Baik	Sesuai Persyaratan
Instansi B	100%	Baik	Sesuai Persyaratan
Instansi C	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi D	88%	Baik	Sesuai Persyaratan

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur jalur evakuasi yakni instansi A, B, dan C 100% dengan kategori baik yang berarti sesuai persyaratan dengan Permen PU No 26 tahun 2008, namun terdapat satu

instansi dengan hasil 0% dengan kategori kurang yang berarti tidak sesuai sama sekali, hal ini dikarenakan pada instansi tersebut jalur evakuasi masih menyatu dengan jalur utama keluar masuk.

**Tabel 7. Gambaran hasil kesesuaian intansi dalam penerapan prosedur pintu darurat dengan Permen PU No.26 Tahun 2008**

Instansi	Hasil	Kategori	Keterangan
Instansi A	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi B	67%	Cukup	Terpasang tetapi ada sebagian yang tidak sesuai
Instansi C	17%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi D	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur pintu darurat yakni instansi A, dan D mendapatkan hasil 0% dengan kategori kurang yang berarti tidak sesuai sama sekali dengan Permen PU No 26 tahun 2008, hal ini dikarenakan pada instansi tersebut tidak terdapat pintu darurat. Sedangkan instansi C dengan hasil 17% dengan kategori kurang yang berarti tidak sesuai dengan peraturan,

hal ini dikarenakan karena intansi C sudah terpasang namun intansi tersebut pintu daruratnya tidak berjenis engsel sisi atau ayun jadi tidak mampu berayun dari posisi manapun hingga terbuka penuh serta pintu darurat tidak membuka kearah jalur keluar dan pintu darurat tidak dalam terbuka setiap saat serta pintu darurat tidak menutup sendiri atau otomatis.

Untuk instansi B mendapatkan hasil 67% dengan kategori cukup yang berarti terpasang namun terdapat sebagian yang tidak sesuai, hal ini dikarenakan instansi B

sudah memiliki pintu darurat namun instansi tersebut pintu daruratnya tidak terbuka setiap saat dan pintu darurat tidak menutup sendiri atau otomatis.

**Tabel 8. Gambaran hasil kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur titik kumpul dengan Permen PU No.26 Tahun 2008**

Instansi	Hasil	Kategori	Keterangan
Instansi A	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi B	100%	Baik	Sesuai persyaratan
Instansi C	100%	Baik	Sesuai persyaratan
Instansi D	67%	Cukup	Terpasang tetapi ada sebagian yang tidak sesuai

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur titik kumpul yakni instansi B, dan C mendapatkan hasil 100% dengan kategori baik yang berarti sesuai persyaratan dengan Permen PU No 26 tahun 2008, hal ini dikarenakan pada instansi tersebut sudah terdapat titik kumpul. Instansi D mendapatkan hasil 67% dengan kategori cukup yang berarti terpasang namun ada

sebagian yang tidak sesuai karena instansi tersebut terdapat lahan yang luas namun tidak tertera arahan atau label titik kumpul di lahan tersebut dan instansi A mendapatkan hasil 0% dengan kategori kurang yang berarti tidak sesuai sama sekali dengan aturan hal ini dikarenakan instansi tersebut tidak memiliki titik kumpul akibat lahannya yang kurang.

**Tabel 9. Gambaran hasil kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur tangga darurat dengan Permen PU No.26 Tahun 2008**

Instansi	Hasil	Kategori	Keterangan
Instansi A	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi B	100%	Baik	Sesuai persyaratan
Instansi C	86%	Baik	Sesuai persyaratan
Instansi D	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur tangga darurat yakni instansi A dan D mendapatkan hasil 0% dengan kategori kurang yang berarti tidak sesuai sama sekali

dengan Permen PU No 26 tahun 2008, hal ini dikarenakan pada instansi tersebut bangunan kurang luas. Untuk instansi B dan C sudah sesuai dengan persyaratan.

**Tabel 10. Gambaran hasil kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur tanggap darurat kebakaran dengan Permen PU No.26 Tahun 2008**

Instansi	Hasil	Kategori	Keterangan
Instansi A	83%	Baik	Sesuai persyaratan
Instansi B	100%	Baik	Sesuai persyaratan
Instansi C	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi D	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa kesesuaian instansi dalam penerapan

prosedur tanggap darurat kebakaran yakni terdapat 2 instansi yang sudah terdapat

anggota tanggap darurat dengan kategori baik yaitu instansi A dengan presentase 83% karena instansi A tidak terdapat perencanaan tindakan darurat kebakaran memuat informasi tentang denah lantai yang berisi alarm kebakaran dan titik panggilan manual, jalan keluar, rute evakuasi, sedangkan

instansi B dengan presentase 100% artinya sudah sesuai dengan persyaratan, dan terdapat 2 instansi yang tidak terdapat anggota atau tim tanggap darurat artinya tidak sesuai sama sekali dengan peraturan yakni instansi C dan D.

**Tabel 11. Gambaran hasil kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur sumber daya manusia penanggulangan kebakaran dengan Permen PU No.26 Tahun 2008**

Instansi	Hasil	Kategori	Keterangan
Instansi A	33%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi B	100%	Baik	Sesuai persyaratan
Instansi C	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali
Instansi D	0%	Kurang	Tidak sesuai sama sekali

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa kesesuaian instansi dalam penerapan prosedur sumber daya manusia penanggulangan kebakaran yakni terdapat 1 instansi yang sudah sesuai dengan peraturan yaitu instansi B dengan presentase 100%, dan terdapat 1 instansi dengan presentase 33% yakni instansi A hal ini

dikarenakan tidak terdapat sumber daya manusia dalam manajemen penanggulangan kebakaran serta belum diadakannya pelatihan dan peningkatan kemampuan secara berkala, dan terdapat 2 instansi yang sama sekali tidak terdapat SDM penanggulangan kebakaran.

#### D. Gambaran Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat terhadap Upaya Pencegahan Kebakaran

**Tabel 12. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Pengetahuan Masyarakat mengenai Pencegahan Kebakaran di Kabupaten dan Kota Cirebon**

Pengetahuan	Jumlah	Presentase
Baik	118	100%
Cukup	0	0
Kurang	0	0
Total	118	100

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon telah mengetahui mengenai potensi

kebakaran dari 118 responden kategoribaik dengan presentase 100%.

**Tabel 13. Distribusi frekuensi responden berdasarkan kelompok perilaku masyarakat mengenai pencegahan kebakaran di kabupaten dan kota cirebon**

Perilaku	Jumlah	Presentase
Sangat Sering	53	44,9%
Sering	53	44,9%
Jarang	2	1,7%
Tidak Pernah	10	8,5%
Total	118	100

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon dari 118 responden terdapat 53 responden dengan presentase 44,9%, yang sangat sering melakukan pencegahan kebakaran terhadap lingkungan sekitar yang jarang yaitu 2 responden dengan presentase 1,7% dan yang tidak pernah melakukan pencegahan kebakaran terhadap lingkungan sekitar yaitu 10 responden dengan presentase 8,5%.

### Kesimpulan

Kesimpulan dalam studi kasus yang di dapat dari beberapa instansi di Kabupaten dan Kota Cirebon serta masyarakat dalam sistem manajemen proteksi kebakaran:

1. Beberapa instansi tidak ada yang sesuai dengan dasar hukum Permen PU No.26 Tahun 2008 mengenai alat deteksi kebakaran, springkler, hydrant, dan alarm kebakaran;
2. Intansi yang sesuai dengan Permen PU No.26 Tahun 2008 mengenai APAR terdapat intansi A dengan presentase (93%) dengan kategori baik sesuai dengan persyaratan;
3. Pengetahuan dan perilaku masyarakat rata-rata telah mengetahui penanganan mengenai tanggap darurat kebakaran.

### Saran

Untuk instansi yang belum sesuai dengan dasar hukum Permen PU No.26 Tahun 2008 mengenai sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif diharapkan memenuhi persyaratan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku agar bisa mencegah dan meminimalisir terjadinya kebakaran di intansi tersebut.

### Daftar Pustaka

- Asiri, L. (2020). Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(2), 28–40. <https://doi.org/10.35326/Kybernan.V3i2.843>.
- Djafar, A., Thaib, A., & Seba, M. (2021).

Evaluasi Tingkat Kepentingan Alat Perlengkapan Serta Pencegahan Resiko Kebakaran Pada Bangunan Gedung Berlantai Di Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Teknik*, 01(01), 23–30. <https://doi.org/10.51135/jts.V1i01.4>.

Fatana, N. (2018). *Analisis Kesesuaian Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Berdasarkan Sni 03-3985 Dan 03-3989 Serta Permen Pu No: 26 Tahun 2008 Di Pt Jasa Marga Jakarta Timur Tahun 2018* (Vol. 372, Issue 2). [Http://Repository.Binawan.Ac.Id/Id/Ep rint/249](http://Repository.Binawan.Ac.Id/Id/Ep rint/249).

Gogendra, G., & Andriyani. (2020). Analisis Penerapan Sistem Proteksi Kebakaran Pasif Dan Sarana Penyelamatan Dalam Upaya Program Emergency Response Plan Di Jakarta Eye Center Kedoya Tahun 2020. *Environmental Occupational Health And Safety Journal*, 1, 129–142. <https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Eo hsj/Article/View/9138/5387>.

Moonti, Mutia Agustiani. Muhammad Billy Armanda. Pengaruh pemberian rebusan daun kersen (*Muntingia calabura L.*) terhadap penurunan Gula Darah Sewaktu (GDS) pada penderita diabetes melitus tipe 2 di Desa Cikadu Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan. *Journal of Public Health Innovation*, 4(01), 235–242. <https://doi.org/10.34305/jphi.v4i01.900>.

Moonti, Mutia Agustiani, Moch. Didik Nugraha, Merissa Laora Heryanto, Ronny Firmansyah Suhada & Aditiya Puspanegara. (2023). Terapi Kognitif Terhadap Penderita Hipertensi. *Jurnal Pemberdayaan Dan Pendidikan Kesehatan*, 2(02), 59–67. <https://doi.org/10.34305/jppk.v2i02.663>.

Murtaqi, M. H., & Rahadian, E. Y. (2023). Simulasi Evakuasi Kebakaran Pada Bangunan Kategori High-Rise Menggunakan Oasys Massmotion (Studi Kasus: Perencanaan Gedung Kampus Pjj lain Cirebon). *Jurnal*

- Arsitektur – Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon* /, 15(11).  
<https://doi.org/10.59970/Jas.V15i1.81>.
- Paat, D. A. I., Tambas, A. H., & Umboh, M. K. (2023). *Analisis Risiko Penanggulangan Kebakaran ( Studi Kasus Universitas Katolik De La Salle Manado )*. 5(3), 181–191.
- Pramayu, A. P., Rahmawati, H. N., Tantia, A. A., Putra, A. P., & Fauzia, R. N. (2023). Tinjauan Persepsi Penghuni Gedung Terhadap Sistem Proteksi Kebakaran Di Gedung Y Tahun 2022 Sebagai Bagian Dari Budaya K3. *Malahayati Nursing Journal*, 5(3), 670–684.  
<https://doi.org/10.34305/jnpe.v2i2.460>.
- Putri, B. A. (2018). *Analisis Manajemen Bencana Kebakaran Di Pusat Perbelanjaan X Semarang*.  
<https://doi.org/10.2554/eprint/2554>
- Putri, D. R., & Kosyeanto, H. (2020). Sistem Proteksi Kebakaran Di Area Tangki Timbun. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 4(Special 1), 350–365.  
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>.
- Putri, N. A., Martono, M., Mawardi, M., Setyono, K. J., & Sukoyo, S. (2019). Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran. *Bangun Rekaprima*, 5(2), 59.  
<https://doi.org/10.34305/jnpe.v2i2.460>.
- Rahardjo, H. A., Hafizh, N., & Prihanton, M. (2019). Manajemen Resiko Kebakaran Untuk Keberlangsungan Fungsi Bangunan. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi 2019 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1–10.  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/5146/3428>
- Sari, M. L., & Sukwika, T. (2020). Sistem Proteksi Aktif Dan Sarana Penyelamatan Jiwa Dari Kebakaran Di Rsud Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 11(2), 190–203.  
<https://doi.org/10.34305/jikbh.v11i2.184>.
- Sholeh, M. A., Suroto, & Wahyuni, I. (2021). Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Pada Rumah Sakit Gigi Dan Mulut X Di Kota Bandung. *Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Pada Rumah Sakit Gigi Dan Mulut X Di Kota Bandung*, 9(1), 51–57.  
<https://doi.org/10.34305/jphi.v4i01.900>.
- Taufiq, M. Taufiq, & Abdi Bangsa, I. (2023). Analisis Instalasi Fire Alarm Pada Basement Apartement Sebagai Sistem Proteksi Kebakaran. *Aisyah Journal Of Informatics And Electrical Engineering (A.J.I.E.E)*, 5(1), 58–66.  
<https://doi.org/10.30604/jti.v5i1.125>.
- Yudila, P., Adha, M. Z., & Bahri, S. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Di Dinas Pemadam Kebakaran Di Upt X. *Frame Of Health Journal*, 1(1), 173–179.  
<https://doi.org/10.34305/jppk.v2i02.663>.